Jurnal I La Galigo | Public Administration Journal
Volume 2, No. 2, Oktober 2019

IMPLEMENTASI PROGRAM HIBAH AIR LIMBAH SETEMPAT DI KELURAHAN SURUTANGA KECAMATAN WARA TIMUR KOTA PALOPO

Kiki Reski

Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Andi Djemma, Palopo
Email : kikireski.1510@gmail.com

Abstrak

Limbah merupakan hasil sisa dari sebuah proses yang tidak dapat digunakan kembali, apabila limbah ini terlalu banyak di lingkungan maka berdampak pada pencemaran lingkungan dan berdampak pada kesehatan dari masyarakat sekitar. Air limbah perkotaan biasanya dialirkan di saluran air kombinasi atau saluran sanitasi, dan diolah di fasilitas pengolahan air limbah atau septic tank. Saat ini masih banyak masyarakat yang belum memiliki akses sanitasi yang memadai untuk menampung limbah khususnya limbah tinja. Untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah membuat program Hibah Air Limbah Setempat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Penelitian ini menganalisis implementasi program hibah air limbah setempat di Kelurahan Surutanga Kecamatan Wara Timur Kota Palopo. Dari hasil analisis menujukkan bahwa masih terdapat beberapa jumlah keluarga penerima bantuan program hibah air limbah setempat belum sesuai dengan standar yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan penyediaan material yang kurang baik oleh pemeintah. Koordinasi antar pelaksana program yang kurang baik dan juga kurangnya sosialisasi ke masyarakat.

Kata Kunci : Implementasi, Hibah, Limbah

PENDAHULUAN

Air limbah menjadi persoalan kontemporer seiring kepadatan penduduk yang semakin meningkat. Setiap rumah tangga yang tinggal di perkotaan pastilah membutuhkan tempat pembuangan air limbah. Sebagian besar rumah tangga membuang air limbah di sungai, selokan, atau badan air lainnya. Air limbah mengandung senyawa-senyawa polutan yang dapat merusak ekosistem air. Air limbah bila tidak dikelola secara baik akan dapat menimbulkan gangguan, baik terhadap lingkungan maupun terhadap kehidupan yang ada (Sugiharto, 2008). Gangguan akibat adanya air limbah yaitu gangguan kesehatan dan gangguan kualitas lingkungan.

Air limbah mengandung bibit penyakit yang dapat menimbulkan penyakit bawaan air. Selain itu di dalam air limbah juga terdapat zat-zat berbahaya dan beracun yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan bagi makhluk hidup yang mengkonsumsinya. Adakalanya, air limbah yang tidak dikelola dengan baik juga dapat menjadi sarang penyakit. Terlebih Indonesia termasuk salah satu negara yang memiliki sistem jaringan air limbah *(sewerage)* terendah di Asia, kurang dari 10 kota di Indonesia yang memiliki sistem jaringan air limbah dengan tingkat pelayanan hanya sekitar 1,3% dari keseluruhan jumlah populasi (http//:ppsp.nawasis.info).

Sebagian besar masyarakat di berbagai daerah di Indonesia belum memiliki akses sanitasi yang memadai untuk menampung limbah tinja. Banyak faktor yang menyebabkan hal demikian salah satunya dapat saja berupa kurang kemampuan teknis pembuatan sarana sanitasi yang baik oleh masyarakat. Sehingga dampak dari bentuk sanitasi yang tidak memadai tersebut, seperti dampak kesehatan dan sebagainya mudah sekali terlihat dan dirasakan. Fenomena ini juga seharusnya menjadi perhatian bagi masyarakat yang bermukim di Daerah perkotaan.

Untuk mengatasi masalah yang demikian pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah membuat program Hibah Air Limbah Setempat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di daerah otonom. Program hibah air limbah yang dimaksud adalah pemberian hibah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan sumber dana yang berasal dari penerimaan dalam negeri atau APBN. Pemerintah daerah disyaratkan melakukan investasi terlebih dahulu dengan menggunakan dana APBD, untuk membangun tangki septik. Program ini lebih diutamakan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang tidak memiliki septik tank dan juga telah memiliki septik tank tetapi belum memenuhi standar. Ini merupakan salah satu langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah sanitasi yang terjadi di Indonesia.

Kebijakan diciptakan untuk mengatur kehidupan masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. kebijakan merupakan tindakan-tindakan atau keputusan yang dibuat oleh pemerintah, dimana tindakan atau keputusan dimaksud memiliki pengaruh terhadap masyarakatnya. Kebijakan sebenarnya telah sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, istilah kebijakan seringkali disamakan dengan istilah kebijaksanaan.

Jika diuraikan terdapat perbedaan antara kebijakan dengan kebijaksanaan. Adapun pengertian kebijaksanaan lebih ditekankan kepada pertimbangan dan kearifan seseorang yang berkaitan dengan aturan-aturan yang ada. Sedangkan kebijakan mencakup seluruh bagian aturan-aturan yang ada termasuk konteks politik, karena pada dasarnya proses pembuatan kebijakan sesungguhnya merupakan suatu proses politik.

Fungsi implementasi kebijakan menurut Abdul Wahab (2005) adalah untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan atau sasaran kebijakan negara diwujudkan sebagai suatu *outcome* (hasil). Sayangnya, dalam khasanah pengetahuan yang kini dikenal dengan sebutan ilmu kebijakan publik, harus diakui bahwa hanya baru pada dasar terakhir ini saja para ilmuwan sosial, khususnya pada para ahli ilmu politik menaruh perhatian yang besar terhadap masalah persoalan pelaksanaan kebijakan atau menerimanya sebagai bagian integral dari studi proses perumusan kebijakan.

Proses untuk melakukan kebijakan perlu mendapatkan perhatian yang seksama. Karena itu, keliru apabila menganggap bahwa proses pelaksanaan kebijakan dengan sendirinya akan berlangsung secara mulus tanpa hambatan. Harus di pahami bahwa proses kebijakan merupakan proses dinamis, banyak faktor yang mempengaruhinya. Kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan memperoleh legitimasi dari lembaga legislatif telah memungkinkan birokrasi untuk bertindak. Pelaksanaan kebijakan dirumuskan secara pendek *to implement (*untuk pelaksanaan*)* berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), berarti *to give practical effect to* (menimbulkan dampak pada sesuatu). Kalau pandangan ini diikuti, maka pelaksanaan kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan, biasanya dalam bentuk undang-undang peraturan pemerintah, peraturan daerah, keputusan peradilan, perintah eksekutif, atau dekrit presiden.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa proses implementasi kebijakan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut prilaku badan-badan administratif yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan pula menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi prilaku dari semua pihak yang terlibat, dan yang pada akhirnya berpengaruh terhadap dampak baik yang diharap (*intended*) maupun yang tidak diharapkan.

Pelaksanaan Program Hibah Air Limbah Setempat menggunakan mekanisme Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.07/2015 tentang perubahan atas peraturan menteri keuangan Nomor 188/PMK.07/2012 tentang Hibah dari pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah.

Tujuan umum dari program tersebut adalah untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan dengan penyediaan prasarana bidang air limbah berupa tangki septik yang sesuai dengan persyaratan teknis. Sehingga dengan terlaksananya program ini dapat mengurangi berbagai permasalahan yang berhubungan dengan sanitasi sehingga berdampak

pula pada terciptanya masyarakat serta lingkungan yang sehat.

Telah banyak daerah Kabupaten/Kota yang tergabung dan menerima program bantuan hibah ini. Di Sulawesi selatan sendiri Kota Palopo merupakan salah satu daerah yang menerima bantuan hibah air limbah ini. Di Kota Palopo, program ini telah dijalankan mulai pada tahun 2017.

Sehubungan dengan rancangan penelitian ini sendiri bahwa pada pelaksanaan program tersebut terdapat permasalahan. Permasalahan tersebut terkait adanya perbedaan mekanisme pelaksanaan program di beberapa kelurahan seperti yang terjadi di kelurahan Surutanga. Pada suatu kelurahan program ini telah dilaksanakan berdasarkan prosedur yang sesuai berdasarkan pada petunjuk pelaksanaan program. Seperti misalnya pemilihan bahan dan perlengkapan, biaya, hingga pada teknis pembuatan septic tank itu sendiri. Namun di Kelurahan Surutanga tidak demikian.

Menurut aturannya, bahwa masing-masing rumah diberikan dana sebesar Rp 3.000.000/rumah tangga (http//:ppsp.nawasis.info). Tetapi, yang jadi masalah bahwa ada beberapa rumah tangga di Kelurahan Surutanga yang turut menerima bantuan hibah air limbah ini namun dalam teknis pembangunannya ada beberapa penerima hibah yang menerima bantuan tidak sesuai dengan daerah atau penerima bantuan di kelurahan lainnya. Contohnya adalah ada beberapa penerima hibah septic tank di kelurahan Surutanga yang dibuatkan tidak sampai pada pembuatan dinding septic tanknya. Sehingga dengan keadaan ini, masyarakat penerima bantuan harus mengeluarkan uang pribadi untuk biaya dinding dan juga biaya tukang yang mengerjakan dinding septic tank tersebut. Sementara, di kelurahan lain seperti kelurahan Latuppa berbanding terbalik. Di kelurahan Latuppa, penerima hibah di setiap rumah menerima hibah secara penuh, artinya bahwa segala perlengkapan dan juga biaya ditanggung secara menyeluruh, termasuk pembuatan dinding septic tanknya, sedangkan dana yang diberikan jumlahnya sama untuk setiap penerima bantuan program ini.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dimana dalam penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti.

Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung dari responden melalui wawancara dan pengamatan langsung di lokasi penelitian sehubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder adalah sebagai data pendukung data primer dari literatur dan dokumen serta data yang diambil dari suatu organisasi dengan permasalahan di lapangan.

Informan

Informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang berpotensi untuk memberikan informasi tentang implementasi Program Hibah Air Limbah Setempat, meliputi:

1) Kepala Bidang Cipta Karya Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palopo.
2) Lurah Kelurahan Surutanga.
3) Masyarakat yang telah menerima program hibah air limbah setempat.

Teknik Analisis Data

Proses analisis data dilakukan secara terus menerus dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen dan sebagainya sampai dengan penarikan kesimpulan.

Adapun Teknik Analisis Data yang di gunakan dalam penelitian ini menurut Miles dan Huberman (Sugiono, 2015):

1) Reduksi Data (*Data Reduction*), artinya merangkum memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal-hal yang penting, mencari tema dan membuang yang tidak perlu.
2) Penyajian Data / *Data Display*, berguna untuk memudahkan peneliti melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian.
3) *Conclusion* atau *verification* adalah menarik kesimpulan dan verifikasi.

HASIL PENELITIAN

Keberhasilan implementasi menurut **Grindle** (Leo Agustino, 2006: 168) dipengaruhi oleh 2 (dua) variabel, antara lain sebagai berikut:

1. Isi kebijakan *(content of policy)*

1) Letak Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Hal ini menunjukkan di mana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang diimplementasikan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dari beberapa informan maka dapat dijelaskan bahwa Implementasi program hibah air limbah setempat jika ditinjau dari indikator letak pengambilan keputusan dapat dikatakan sudah tepat. Seperti yang dikatakan oleh Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PU bahwa cukup tepat karena dengan melihat standar pelayanan yang diberikan dari Pemerintah Kota Palopo saat ini dianggap masih kurang atau masih sangat rendah, sehingga dengan adanya Program tersebut dapat membantu pemerintah Kota Palopo dalam mewujudkan sanitasi yang layak di masyarakat. Kemudian sasarannya juga sudah tepat karena program ini ditujukan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sesuai dengan keterangan Sekertaris Kelurahan Surutanga yang mana juga telah sesuai dengan pedoman pelaksanaan program yang mengatakan bahwa program diutamakan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Sementara penilaian masyarakat mengenai Program Hibah Air Limbah Setempat ini merasa bahwa pengambilan keputusan yang dilakukan pemerintah sudah tepat karena memiliki banyak manfaat dari program ini yang bisa dirasakan oleh masyarakat, antara lain dari segi kebersihan dan juga kesehatannya sebab selama ini rata-rata membuang kotoran tinja ke sungai.

2) Pelaksana program

Dalam menjalankan suatu kebijakan perlu didukung adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan. Hal ini harus sudah terdata atau terdapat dengan baik pada bagian ini.

Dari hasil wawancara di dilapangan bahwa Implementasi program hibah air limbah setempat jika ditinjau dari indikator pelaksana program dapat dikatakan kurang baik karena kurangnya koordinasi antar pelaksana program, hal ini terbukti dari hasil wawancara kepada Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PU yang mengatakan bahwa kerjasama yang dilakukan oleh Dinas PU hanya dengan CV saja. Padahal hasil wawancara dari masyarakat mengatakan bahwa yang melaksanakan program adalah CV dengan TNI. Kemudian kurangnya peran dari pihak Kelurahan dalam pengawasan pelaksanaan program. Hal ini terbukti dari hasil wawancara yang dilakukan di masyarakat mengatakan bahwa pelaksanaan program dilakukan oleh CV dengan TNI saja tanpa adanya peran dari Kelurahan, sehingga ini yang menjadi celah bagi pelaksana program di lapangan yang pada akhirnya rumah tangga yang menjadi sasaran program masih ada yang belum selesai pembangunan septik tanknya, lalu dengan keadaan ini menjadikan masyarakat harus mengeluarkan uang pribadi untuk membayar ongkos kerja tukang untuk menyelesaikan pembangunan septik tanknya. Kemudian hal ini menyebabkan masyarakat belum cukup puas dari kinerja pelaksana program itu sendiri.

3) Sumber Daya yang Digunakan

Pelaksana kebijakan juga harus didukung sumber daya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa Implementasi Program Hibah Air Limbah Setempat jika dilihat dari indikator sumberdaya yang digunakan dapat dikatakan masih kurang baik karena bantuan berupa material yang diberikan kepada masyarakat masih berbeda-beda. Ada yang mengeluhkan pemberian material yang kurang untuk pembangunan septik tank sehingga menyebabkan masyarakat membeli material tambahan sendiri menggunakan uang pribadi. Sudah seharusnya menjadi tanggungjawab pelaksana program bahwa setiap material harusnya tercukupi. Kemudian masalah lain juga yang dikeluhkan yaitu cetakan berupa gorong-gorong yang menjadi penampung kotoran yang diberikan terlalu rapuh yang disebabkan kualitas bahan yang digunakan tidak baik sehingga banyak yang tidak menggunakan cetakan tersebut.

Sehingga ini seharusnya menjadi perhatian bagi pelaksana program agar lebih teliti dalam memilih sumberdaya yang digunakan agar tidak terjadi pemborosan anggaran.

2. Lingkungan Kebijakan

1) Kekuasaan, kepentingan -kepentingan dan strategi aktor yang terlibat.

Dalam suatu kebijakan perlu dipertimbangkan kekuatan atau kekuasaan, kepentingan, serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan.

Berdasarkan wawancara mengenai Implementasi Program Hibah Air Limbah Setempat jika ditinjau dari indikator kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan strategi aktor yang terlibat dapat dikatakan sudah baik. Kekuasaan dalam hal ini yaitu pemerintah Kota Palopo dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palopo selaku implementor utama dari kebijakan ini berupaya menciptakan kenyamanan terhadap kondisi lingkungan Kota dalam hal sanitasi. Dalam hal ini, tentunya kita dapat melihat bahwa memang program yang diterapkan ini betul-betul merupakan kepentingan masyarakat, hal ini bisa kita lihat dari komentar Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PU di atas yang mengatakan bahwa program ini murni untuk masyarakat semata, apalagi kalau dilihat dari keadaan di masyarakat masalah sanitasinya memang masih tinggi.

Sedangkan strategi merupakan hal yang penting bagi pelaksana program dalam menerapkan suatu kebijakan. Kalau kita melihat strategi yang diterapkan untuk Dinas PU sendiri tidak ada strategi khusus sebab program diserahkan ke CV, tetapi dari pihak Kelurahan memberikan strategi berupa motivasi yang bersifat imbauan kepada masyarakat untuk lebih sadar akan kebersihan lingkungan dan juga kesehatan.

2) Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa

Lingkungan di mana suatu kebijakan dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya. Karakteristik suatu lembaga akan turut mempengaruhi keberhasilan kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan mengenai Implementasi Program Hibah Air Limbah Setempat jika ditinjau dari indikator karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa bisa dikatakan sudah baik. Bentuk dan karakteristik lembaga juga turut menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Meskipun selama ini dirasakan dapat berjalan dengan baik, namun penyebab terjadinya pergolakan di tingkat bawah merupakan akibat kurangnya koordinasi antar lembaga pada tahap implementasi kebijakan. Pemerintah kota Palopo saat ini menurut masyarakat sudah baik apabila melihat dari program yang dilaksanakan dalam hal ini yang dimaksud adalah program hibah air limbah setempat ini. Pemilihan program yang tepat dianggap oleh masyarakat bahwa pemerintah sudah baik.

PEMBAHASAN

Implementasi merupakan aktivitas yang terlihat setelah adanya pengarahan yang sah dari suatu program yang meliputi upaya mengelola input. Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino 2006:124) mendefinisikan "implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan". Tindakan-tindakan yang dimaksud mencakup usaha untuk mengubah keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh program.

Adapun menurut Woll kebijakan merupakan aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat (dalam Tangkilisan, 2003:2).

Implementasi kebijakan (*policy implementation*) merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan. Implementasi bukanlah sekedar bersangkut paut dengan

mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik kedalam prosedur-prosedur rutin lewat saran-saran birokrasi, melalui lebih dari itu, termasuk masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan. Pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan mungkin jauh lebih penting dari pada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan (Grindle dalam Abdul Wahab : 2005). Untuk mewujudkan keberhasilan suatu kebijakan harus berjalan secara linear dari kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan publik. Dalam implementasi program hibah air limbah setempat yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palopo sendiri masih menemui kendala dalam pelaksanaannya.

Keberhasilan implementasi menurut **Grindle** (*dalam* Leo Agustino, 2006: 168) dipengaruhi oleh 2 (dua) variabel, antara lain sebagai berikut:

1. Isi kebijakan *(content of policy)*

a. Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi Yaitu berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu kebijakan. Indikator ini berargumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan.

b. Tipe manfaat

Pada poin ini, isi kebijakan berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang dilaksanakan.

c. Derajat perubahan yang ingin dicapai. Setiap kebijakan mempunyai derajat perubahan yang hendak dicapai. Yang ingin dijelaskan pada poin ini adalah apa saja perubahan yang ingin dicapai dalam kebijakan.

d. Letak pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Hal ini menunjukkan di mana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang diimplementasikan. Berdasarkan indikator ini, pihak Dinas PU mengatakan bahwa pengambilan keputusan yang dilakukan sudah tepat karena melihat kondisi di masyarakat mengenai standar pelayanan mengenai sanitasi masih tergolong rendah, sedangkan dari pihak kelurahan juga setuju bahwa ini merupakan keputusan yang tepat karena sudah tepat pada sasarannya yaitu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Respon dari masyarakat terhadap program ini juga cukup positif, sebab sebagian besar dari masyarakat menilai bahwa masalah sanitasi penting untuk kebersihan dan juga kesehatan.

e. Pelaksana program. Dalam menjalankan suatu kebijakan perlu didukung adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan. Hal ini harus sudah terdata atau terdapat dengan baik pada bagian ini. Mengenai pelaksana program ini, pihak PU mengatakan bahwa kerjasama yang dilakukan hanya sebatas dengan CV, mengenai kerjasama CV dengan pihak lain pihak PU tidak mengetahui karena tidak ada laporan. Lalu dari pihak Kelurahan sendiri kurang aktif dalam program ini sehingga menyebabkan pelaksana program di lapangan lebih leluasa untuk berbuat "curang". Hal ini dapat dilihat dari keadaan di lapangan di mana masih ada masyarakat yang diberikan bantuan tetapi tidak sampai tuntas pengerjaannya. Hal ini menunjukkan bahwa koordinasi antar pelaksana program masih kurang baik dan juga sosialisasi yang kurang.

f. Sumber daya yang digunakan Pelaksana kebijakan juga harus didukung sumber daya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik. Untuk pemilihan sumberdaya yang digunakan dalam pelaksanaan program ini masih kurang baik, hal ini terbukti dari adanya masyarakat yang mengeluhkan kekurangan bahan yang diberikan, kemudian juga adanya bahan yang kurang berkualitas.

2. Lingkungan kebijakan

a. Kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan strategi aktor yang terlibat. Dalam suatu kebijakan perlu dipertimbangkan kekuatan atau kekuasaan, kepentingan, serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Untuk pemilihan sumberdaya yang digunakan dalam

pelaksanaan program ini masih kurang baik, hal ini terbukti dari adanya masyarakat yang mengeluhkan kekurangan bahan yang diberikan, kemudian juga adanya bahan yang kurang berkualitas.

b. Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa. Lingkungan di mana suatu kebijakan dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya. Karakteristik suatu lembaga akan turut mempengaruhi keberhasilan kebijakan. Menurut masyarakat yang diwawancarai menilai bahwa pemerintah saat ini jika dlihat dari program yang diterapkan dalam hal ini Program Hibah Air Limbah Setempat sudah cukup baik karena manfaatnya yang besar.

c. Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana. Kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana kebijakan merupakan hal penting yang mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan.

Keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir (*outcomes*), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih. Hal ini dikemukakan oleh Grindle dalam Agustino (2008:154), pengukuran implementasi kebijakan tersebut dapat dilihat dari dua hal, yaitu: pertama dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (*design*) dengan merujuk pada aksi kebijakannya. Kedua apakah tujuan kebijakan tercapai.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam mengimplementasikan suatu kebijakan harus terlihat jelas isi dari suatu kebijakan tersebut dan mampu melihat situasi lingkungan kebijakan dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang dapat mempengaruhi proses implementasinya serta faktor pendukung yang dibutuhkan dalam pencapaian tujuan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Implementasi Program Hibah Air Limbah Setempat di Kelurahan Surutanga Kecamatan Wara Timur Kota Palopo belum optimal, disebabkan karena masih terdapat beberapa jumlah keluarga penerima bantuan program hibah air limbah setempat belum sesuai dengan standar yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan penyediaan material yang kurang baik oleh pemeintah. Koordinasi antar pelaksana program yang kurang baik dan juga kurangnya sosialisasi ke masyarakat.

Dari hasil penelitian yang ditemukan dilapangan sebaiknya dalam implementasi program pemerintah seluruh pihak yang terlibat di dalam pelaksanaan program agar kiranya lebih meningkatkan integritas dan sinergitas dalam hal pengawasan dan kinerja agar dapat meminimalisir kegagalan di dalam pelaksanaan program. Penyediaan sumberdaya yang baik dari segi kualitas dan juga cukup dari segi kuantitasnya. Kemudian lebih memperbanyak sosialisasi antar Dinas terkait maupun pihak swasta yang meliputi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kelurahan serta CV. Sosialisasi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan dan kebersihan lingkungan sehingga ke depannya dapat terwujud suatu keadaan yang diinginkan dari pelaksanaan program dan juga memberikan kenyamanan bagi masyarakat sebagai penerima bantuan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahab, Solichin. 2005. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta:

Agustino, Leo. 2006. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.

————. 2006. *Politik dan Kebijakan Publik.* Bandung: AIPI.

————. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik.* Bandung: CV. Alfabeta.

Sugiharto. 2008. *Dasar-dasar Pengolahan Air Limbah.* Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Bandung: CV. Alfabeta.

Tangkilisan, Hesel Nogi. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik.* Yogyakarta : Lukman Offset YPAPI.